DOKUMEN KURIKULUM 2025

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

KURIKULUM PRODI MAGISTER ILMU HUKUM

TIM PENYUSUN | JALAN BOROBUDUR NO. 7, MENTENG, JAKARTA PUSAT

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Nama Ketua Tim : Dr. M Ilham Hermawan, S.H., M.H.
NIDN : 0330097603
Program Studi : Ilmu Hukum (S2)
Fakultas : Hukum
Universitas : Pancasila

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
Universitas Pancasila
Tahun 2025

LEMBAR PENGESAHAN

UNIVERSITAS PANCASILA

KEPUTUSAN KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
Nomor: 87/Kep/Ka. PMIH-UP/II/2025

TENTANG
TIM PERUMUS KURIKULUM PERMENRISTEK DIKTI NOMOR 53 TAHUN 2023
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

KETUA PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meninjau dan merumuskan Kurikulum Permenristek Dikti Nomor 53 Tahun 2023 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila perlu dibentuk Tim Perumus Kurikulum;

b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Prodi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor: 88/PER/YPP-UP/X/2023 tentang Statuta Universitas Pancasila.

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

1

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Tim Perumus Kurikulum Permenristek Dikti Nomor 53 Tahun 2023 pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Pimpinan
Ketua	:	Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.
Wakil Ketua	:	Dr. M. Ilham Hermawan, S.H., M.H.
Sekretaris	:	Muhammad Wildan Muttaqien, S.Kom.
Bendahara	:	Dariah, S.M.
Koordinator	:	Herman, S.H., M.Pd.
Anggota		1. Dewi Kartika, S.E. 2. M. Febrian Sudi Prasetya, S.Kom.
Perumus	:	1. Prof. Dr. Drs. Astim Riyanto, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Agus Surono, S.H., M.H. 3. Dr. Jum Anggriani, S.H., M. Hum. 4. Dr. Ir. Fontian Munzil, S.H., S.M., M.H., M.B.A., M.Ak., M.E., CFrA. 5. Dr. Dea Tunggaesti, S.H., M.M. 6. Dr. Asep Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Kedua : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

1. Meninjau, mengkaji dan merumuskan Kurikulum Permenristek Dikti Nomor 53 Tahun 2023 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila; dan
2. Mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perumusan Kurikulum Baru.

Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Dekan.

Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Program Magister Ilmu Hukum.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

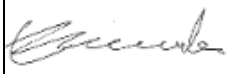
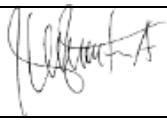
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Februari 2025

Kaprodi,

Dr. Indah Harlina, S.H., M.H.

Tembusan Yth:
1. Dekan;
2. Wadek II;
3. Yang Bersangkutan; dan
4. Pertinggal.

2

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Persetujuan	Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.	Dekan Fakultas Hukum		27 Oktober 2025
Penetapan	Dr. Zaitun Abdullah, S.H., M.H.	Wakil Dekan I Fakultas Hukum		27 Oktober 2025
Pengendalian	Dr. Lisda Syamsumardian, S.H., M.H.	Ketua Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum		27 Oktober 2025

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN **I**

DAFTAR ISI **IV**

KATA PENGANTAR **VII**

IDENTITAS PROGRAM STUDI **VIIII**

1 LANDASAN KURIKULUM **1**

1.1 LANDASAN FILOSOFI 1
1.2 LANDASAN SOSILOGIS 1
1.3 LANDASAN PSIKOLOGI 2
1.4 LANDASAN HISTORIS 2
1.5 LANDASAN HUKUM 3

2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI **4**

2.1 VISI 4
2.2 MISI 4
2.3 TUJUAN 4
2.4 STRATEGI 5
2.5 UNIVERSITAS VALUE 5

3 HASIL EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY **7**

3.1 EVALUASI KURIKULUM 7
3.2 TRACER STUDY 7

4 PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) **10**

4.1 PROFIL LULUSAN 10
4.2 PERUMUSAN CPL 11
4.3 MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN 12

5 PENENTUAN BAHAN KAJIAN **14**

5.1 GAMBARAN *BODY OF KNOWLEDGE* (BOK) 14
5.2 DESKRIPSI BAHAN KAJIAN 16

6 PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS **20**

7 STRUKTUR MATAKULIAH DLM KURIKULUM PROGRAM STUDI **32**

7.1 STRUKTUR KURIKULUM 32
7.2 PETA KURIKULUM BERDASARKAN CPL PRODI 34

8 DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER **37**

9 PENENTUAN BOBOT CPL PADA MK ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

9.1 TAHAPAN PENENTUAN BOBOT CPL PADA MK ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
9.2 PENENTUAN BESARNYA KONTRIBUSI SETIAP CPL THD SELURUH CPL**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

10 MODALITAS PEMBELAJARAN DALAM PERANCANAAN PROSES PEMBELAJARAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

11 PENILAIAN PEMBELAJARAN ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

11.1 RUBRIK ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
11.2 PORTOFOLIO PENILAIAN HASIL BELAJAR ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

12 IMPLEMENTASI HAK BELAJAR MAHASISWA MAKSIMUM 3 SEMESTER ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

12.1 MODEL IMPLEMENTASI MBKM (CONTOH) ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.2 PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI LUAR PROGRAM STUDI DI KAMPUS YG SAMA ... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.3 PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) DI PROGRAM STUDI YG SAMA DI PERGURUAN TINGGI YG BERBEDA ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.4 PEMBELAJARAN MATA KULIAH (MK) PROGRAM STUDI YG BERBEDA DI PERGURUAN TINGGI YG BERBEDA ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.5 BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARA DI LUAR PERGURUAN TINGGI DALAM BKP-MBKM (CONTOH) ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.6 MATA KULIAH (MK) – MBKM PENGAKUAN KREDIT ATAS KOMPETENSI TAMBAHAN ATAS KEGIATAN BELAJAR BKP-MBKM ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
12.7 PENJAMINAN MUTU PELAKSANAAN MBKM ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**

13 PENGELOLAAN & MEKANISME PELAKSANAAN KURIKULUM 39

14 TATA CARA PENERIMAAN MAHASISWA PADA BERBAGAI TAHAPAN KURIKULUM ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

15 PENUTUP 41

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Pancasila ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai wujud komitmen prodi dalam menjaga dan meningkatkan mutu tata kelola akademik yang berkelanjutan.

Pengembangan kurikulum ini mengacu pada Buku Panduan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT 4.0), Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), serta berorientasi pada pendekatan *Outcome-Based Education* (OBE). Guna menjawab tantangan hukum di era digital dan global, kurikulum ini dirancang secara komprehensif dengan mengintegrasikan keragaman modalitas belajar mahasiswa, metode pembelajaran partisipatif berbasis kasus (*Case-Based Method*), serta moda bauran (*blended learning*).

Penyusunan dokumen ini juga diselaraskan dengan siklus Penjaminan Mutu Internal (PPEPP) demi memenuhi standar mutu instansi serta Asesmen Mutu Internal (AMI) ISO. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Pengembang Kurikulum, pimpinan fakultas, para dosen, alumni, serta pengguna lulusan yang telah memberikan kontribusi, pemikiran, dan masukan berharga dalam penyempurnaan kurikulum ini.

Semoga dokumen kurikulum ini dapat menjadi pedoman yang efektif bagi seluruh dosen dan pengelola program studi dalam melaksanakan proses pembelajaran, demi melahirkan lulusan Magister Ilmu Hukum yang unggul, berintegritas, dan berjiwa Pancasila.

Jakarta, Oktober 2025

Tim Perumus Kurikulum
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Universitas Pancasila

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Pancasila □ PTN √ PTS
2	Fakultas	Hukum
3	Jurusan/Departemen	-
4	Program Studi	Ilmu Hukum (S2)
5	Status Akreditasi	Unggul
6	Jumlah Mahasiswa	146
7	Jumlah Dosen	7 (tujuh)
8	Alamat Prodi	Jalan Borobudur No. 7, Menteng, Jakarta Pusat
9	Telpn	021 – 391 9013
10	Web PRODI/PT	magisteroflaw.univpancasila.ac.id

1 Landasan Kurikulum

1.1 Landasan Filosofi

Landasan filosofis merupakan dasar pemikiran yang memberikan arah dan makna terhadap pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan tinggi. Filsafat pendidikan menjadi pedoman untuk membentuk manusia pembelajar yang berilmu, bermoral, dan berdaya guna bagi masyarakat.

Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum dibangun di atas empat aliran utama filsafat pendidikan, yaitu perenialisme, esensialisme, progresivisme, dan rekonstruksionisme, yang secara integratif mendukung terbentuknya insan akademik yang berpengetahuan luas, berintegritas, serta berkomitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

1. Perenialisme
   Menekankan pentingnya nilai-nilai universal dan kebenaran abadi. Dalam konteks hukum, hal ini diwujudkan melalui pengkajian prinsip-prinsip dasar hukum seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Perenialisme membentuk kemampuan mahasiswa berpikir rasional dan mendalam terhadap hakikat hukum sebagai sarana menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.
2. Esensialisme
   Menekankan penguasaan ilmu dan keterampilan dasar yang esensial. Landasan ini diterapkan melalui penguatan penguasaan teori hukum, filsafat hukum, dan metodologi penelitian hukum. Mahasiswa dilatih berpikir kritis dan sistematis sehingga mampu menjadi akademisi dan praktisi hukum yang profesional dan berintegritas.
3. Progresivisme
   Berorientasi pada pembelajaran kontekstual dan pemecahan masalah. Kurikulum mengadopsi pendekatan *student-centered learning* dengan metode studi kasus, klinik hukum, dan penelitian empiris. Mahasiswa didorong menjadi pemikir kritis dan inovatif dalam merespons perkembangan hukum dan sosial yang dinamis.
4. Rekonstruksionisme
   Menekankan peran pendidikan dalam mendorong perubahan sosial menuju masyarakat yang adil dan bermartabat. Mahasiswa dibentuk menjadi agen perubahan (agent of change) yang mampu menggunakan hukum sebagai instrumen rekonstruksi sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Landasan filosofis ini mengarahkan kurikulum agar tidak hanya menghasilkan lulusan yang cakap secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran etis, reflektif, dan kemanusiaan dalam menerapkan hukum untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan masyarakat.

1.2 Landasan Sosilogis

Landasan sosiologis menekankan keterkaitan antara pendidikan hukum dan kehidupan masyarakat. Kurikulum Program Studi Magister Ilmu Hukum dikembangkan dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terus berubah, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global.

Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi, kemajuan teknologi, dan kompleksitas hubungan antarindividu menuntut hukum yang adaptif dan berkeadilan. Oleh karena itu, pendidikan hukum harus menyiapkan lulusan yang tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Kurikulum ini diarahkan untuk:

1. Menumbuhkan sensitivitas sosial dan kesadaran hukum masyarakat;
2. Mengembangkan kemampuan analisis kritis terhadap realitas sosial;
3. Mendorong keterlibatan akademik dalam pembangunan hukum nasional;

4. Mengintegrasikan nilai sosial, moral, dan budaya lokal dalam pendidikan hukum;
5. Menyiapkan lulusan sebagai agen pembaruan hukum dan sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

Landasan sosiologis ini menjamin agar kurikulum memiliki relevansi dengan kebutuhan masyarakat dan dapat menghasilkan lulusan yang berkepekaan sosial tinggi dan berkomitmen terhadap penegakan hukum yang bermartabat.

1.3 Landasan psikologi

Landasan psikologis berkaitan dengan pemahaman terhadap karakteristik dan potensi peserta didik. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum merupakan individu dewasa yang memiliki kemandirian berpikir, pengalaman akademik dan profesional, serta motivasi intrinsik untuk memperdalam keilmuan.

Kurikulum disusun berdasarkan prinsip-prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa) yang menekankan pada pembelajaran aktif, reflektif, dan relevan dengan kebutuhan profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) seperti analisis, sintesis, evaluasi, dan pemecahan masalah hukum yang kompleks.

Kurikulum diarahkan untuk:

1. Mengembangkan potensi intelektual, emosional, dan moral mahasiswa;
2. Mendorong pembelajaran aktif, partisipatif, dan reflektif;
3. Meningkatkan motivasi belajar intrinsik dengan mengaitkan teori dan praktik hukum;
4. Menumbuhkan tanggung jawab, etika, dan integritas akademik;
5. Menciptakan lingkungan belajar yang mendukung kemandirian dan kreativitas.

Landasan psikologis ini memastikan bahwa proses pembelajaran tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian ilmiah, kematangan berpikir, dan keseimbangan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik mahasiswa.

1.4 Landasan Historis

Landasan historis mengacu pada perjalanan dan perkembangan pendidikan hukum di Indonesia sebagai dasar pengembangan kurikulum. Sejarah pendidikan hukum di Indonesia mencerminkan transformasi dari sistem hukum kolonial yang berorientasi pada kekuasaan menuju sistem hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan hukum modern di Indonesia berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan pembaruan hukum nasional, demokratisasi, dan globalisasi. Program Studi Magister Ilmu Hukum hadir untuk menjawab tuntutan tersebut dengan menyediakan pendidikan hukum yang lebih analitis, kritis, dan transformatif.

Kurikulum Magister Ilmu Hukum dirancang untuk:

1. Melanjutkan tradisi keilmuan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial;
2. Merefleksikan perkembangan historis hukum nasional dan pendidikan hukum;
3. Menjaga kesinambungan antara warisan keilmuan klasik dan tuntutan modernisasi hukum;
4. Mengembangkan kemampuan analitis mahasiswa terhadap perubahan hukum dalam konteks historis;
5. Meneguhkan peran pendidikan hukum sebagai pilar pembangunan bangsa dan penegakan hukum nasional.

Landasan historis ini menegaskan bahwa pengembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dari akar sejarah dan dinamika pembentukan hukum nasional. Dengan demikian, pendidikan hukum di tingkat magister berfungsi untuk mengembangkan kesadaran sejarah, memperkuat identitas nasional, dan memperkokoh sistem hukum Indonesia dalam menghadapi tantangan global.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS.
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
11. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi
13. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2274/PER.R/UP/VII/2015 tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
14. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 3068/PER.R/UP/IX/2015 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Fakultas dan Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
15. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik

2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

2.1 Visi

Visi **Universitas Pancasila**
”Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”

Visi **Fakultas Hukum**
”Menjadi Fakultas Hukum Unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas dan Profesional berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila”

2.2 Misi

Misi **Universitas Pancasila**

1. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
2. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
3. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Misi **Fakultas Hukum**

1. Melaksanakan pendidikan tinggi hukum yang akuntabel, berintegritas dan profesional.
2. Membangun kerja sama nasional dan internasional untuk pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian hukum yang relevan dan berdaya saing global.

2.3 Tujuan

Tujuan **Universitas Pancasila**

1. Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila
2. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara
3. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing IKM serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
4. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, asset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan
5. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

Tujuan **Fakultas Hukum**
”Menghasilkan lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan ilmu hukum untuk memecahkan permasalahan hukum di masyarakat”

2.4 Strategi

Sasaran Strategis **Universitas Pancasila**

1. Universitas Pancasila sebagai pendidikan tinggi yang unggul dalam menghasilkan lulusan yang kompeten, berwawasan kewirausahaan, dan memiliki etika moral Pancasila.
2. Universitas Pancasila menghasilkan riset dan produk/jasa/inovasi yang berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa.
3. Universitas Pancasila menjadi perguruan tinggi yang aktif dalam memajukan Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta berkontribusi dalam membangun masyarakat.
4. Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dalam tata kelola yang berbasis pada good university governance (GUG) dan digital.
5. Universitas Pancasila menjadi mitra kerjasama yang terpercaya dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Strategi **Fakultas Hukum**

1. Memfasilitasi Mahasiswa untuk menambah kompetensinya sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri dan masa depan Mahasiswa;
2. Memfasilitasi Mahasiswa dengan kurikulum yang memenuhi tuntutan dunia usaha, industri dan masa depan sehingga kompetensi soft skill dan hard skill terpenuhi;
3. Meningkatkan pelatihan dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
4. Melakukan pengembangan berdasarkan evaluasi atau tinjauan kurikulum berkala sesuai dengan hasil tracer study;
5. Mendorong dilakukannya riset oleh dosen dengan melibatkan mahasiswa sekaligus publikasinya melalui pemberian insentif dan penghargaan

2.5 Universitas Value

Penyelenggaraan pendidikan di Universitas Pancasila, khususnya pada Fakultas Hukum, merupakan perwujudan tanggung jawab moral, ilmiah, dan sosial institusi di tengah masyarakat. Nilai-nilai Universitas (*University Values*) bukan sekadar slogan, melainkan prinsip-prinsip substansial yang diperjuangkan secara konsisten, yang berakar kuat pada tiga dimensi keberadaan institusi:

1. **Landasan Filosofis**: Etika Moral dan Jati Diri Pancasila
   Secara filosofis, Universitas Pancasila dan Fakultas Hukum menempatkan Pancasila sebagai jangkaran epistemologis dan moral dalam seluruh kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
   Nilai yang diperjuangkan adalah Integritas Moral, Kejujuran Ilmiah, dan Hukum yang Berkeadilan.
   Implementasi dalam Kurikulum yaitu Menghasilkan lulusan Magister Ilmu Hukum yang tidak hanya cerdas secara dogmatika hukum, tetapi memiliki etika moral Pancasila yang kuat. Kurikulum dikembangkan untuk melahirkan pemikiran hukum yang humanis, berintegritas, dan mampu menjaga keluhuran hukum di Indonesia.
2. **Landasan Sosiologis**: Kebermanfaatan, Responsivitas, dan Sinergi Kemandirian Bangsa
   Secara sosiologis, kehadiran Universitas Pancasila didedikasikan untuk menjadi solusi atas realitas dan dinamika yang terjadi di masyarakat, dunia usaha, dunia industri (DUDI), serta sektor ekonomi kerakyatan (IKM).
   Nilai yang diperjuangkan adalah Responsivitas Sosial, Inklusivitas, Kerja Sama (Gotong Royong), dan Wawasan Kewirausahaan.
   Implementasi dalam Kurikulum yaitu Proses pembelajaran dirancang secara partisipatif dan kolaboratif agar mahasiswa mampu memecahkan permasalahan hukum riil di masyarakat. Melalui riset dosen yang melibatkan mahasiswa serta

kemitraan strategis nasional-internasional, kurikulum ini melayani kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan daya saing kemandirian bangsa.

3. **Landasan Historis**: Akuntabilitas, Keunggulan Tata Kelola, dan Daya Saing Global
   Secara historis, Universitas Pancasila mengemban amanah besar untuk terus menjadi institusi yang unggul, terkemuka, dan terpercaya dari generasi ke generasi dengan mengadopsi tata kelola modern yang relevan dengan perkembangan zaman.
   Nilai yang diperjuangkan adalah Profesionalisme, Akuntabilitas, Transparansi, dan Keunggulan Berkelanjutan.
   Implementasi dalam Kurikulum yaitu Pelaksanaan pendidikan hukum wajib diselenggarakan secara akuntabel, profesional, dan berbasis pada Good University Governance (GUG) serta teknologi digital. Evaluasi dan penjaminan mutu kurikulum dilakukan secara berkala berbasis data empiris (tracer study) untuk menjamin kompetensi hard skill dan soft skill mahasiswa selalu relevan dan memiliki daya saing global.

Universitas Pancasila dan Fakultas Hukum memperjuangkan model pendidikan hukum yang berkarakter. Kami meyakini bahwa hukum tidak boleh sekadar menjadi teks mati. Oleh karena itu, melalui landasan Filosofis Pancasila yang beretika, kepekaan Sosiologis terhadap kebutuhan masyarakat, industri, dan IKM, serta komitmen Historis pada tata kelola yang akuntabel (GUG), kurikulum ini digerakkan untuk mencetak ahli hukum magister yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing global demi kemaslahatan bangsa.

2.6 Visi Keilmuan Program Studi

Mengembangkan teori dan praktik Ilmu Hukum berkarakter *Good Corporate Governance* yang akuntabel melalui riset inovatif dan interdisipliner yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila demi mendukung pembangunan hukum nasional dan global

3 Hasil Evaluasi Kurikulum & Tracer Study

3.1 Evaluasi Kurikulum

Mekanisme Evaluasi Kurikulum

Evaluasi kurikulum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Pancasila dilaksanakan secara berkala dan sistematis dengan merujuk pada buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT 4.0) Edisi IV Tahun 2020 serta siklus SPMI (PPEPP). Mekanisme evaluasi kurikulum berjalan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- Tahap Evaluasi Formatif (Tahunan): Monitoring dan Evaluasi (Monev) dijalankan pada setiap akhir semester oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) untuk menilai kesesuaian Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan realisasi perkuliahan 16 pertemuan, keterisian LMS, dan sebaran nilai mahasiswa.
- Tahap Pengumpulan Data (*Tracer Study* & *Stakeholder Review*): Melakukan pelacakan alumni (*tracer study*) dengan instrumen kuesioner naratif guna menjaring umpan balik dari para lulusan dan pengguna lulusan (*users*), yang meliputi instansi peradilan, firma hukum, lembaga negara, dan sektor korporasi.
- Tahap *Focus Group Discussion* (FGD): Menyelenggarakan forum diskusi terarah dengan mengundang pakar hukum (akademisi), asosiasi profesi hukum, alumni, dan DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri) guna membahas relevansi kurikulum berjalan.
- Tahap Analisis Kesenjangan (*Gap Analysis*): Membandingkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) lama dengan kebutuhan nyata di dunia kerja serta perkembangan keilmuan hukum terkini (khususnya menyangkut keunikan prodi di bidang *Good Corporate Governance*).

Evaluasi Kurikulum

Berdasarkan pendekatan KPT 4.0, unsur-unsur Kurikulum 2025 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila yang dievaluasi meliputi:

- Kesesuaian Profil Lulusan dan CPL: Menilai sejauh mana CPL prodi mampu membekali 4 rumpun profil lulusan (Praktisi peradilan, Advokat/Analis kebijakan, *Drafter* kontraktual/legislatif, serta Arbiter/Akademisi) yang telah ditetapkan.
- Struktur Mata Kuliah dan Beban SKS: Evaluasi terhadap total beban 50 SKS yang tersebar di 4 semester, ketepatan penempatan mata kuliah wajib dasar di Semester I (seperti Teori Hukum, Filsafat Hukum, Metode Penelitian Hukum) , mata kuliah keunikan instansi di Semester II (seperti Good Corporate Governance), serta distribusi mata kuliah peminatan di Semester III.
- Kedalaman Bahan Kajian: Pembedahan substansi materi ajar, keterbaruan literatur/regulasi, dan tumpang tindih (*overlapping*) materi antar mata kuliah serumpun.
- Metode Pembelajaran dan Penilaian: Evaluasi pemenuhan Indikator Kinerja Utama (IKU 6) mengenai persentase implementasi metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Case-Based Method* dan *Team-Based Project*).

3.2 Tracer Study

Hasil Evaluasi, Hasil Tracer Study, dan Rencana Perbaikan

Berdasarkan hasil pelacakan berkala yang dilakukan secara naratif kepada para alumni dan pengguna lulusan (*stakeholders*), diperoleh potret komprehensif yang melandasi rekonseptualisasi kurikulum:

1. Dasar Perumusan **Profil Lulusan**: Masukan dari instansi kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan menekankan pentingnya penguatan karakter etis dan kepemimpinan di samping keahlian litigasi. Hal ini memperkokoh penetapan profil lulusan kelompok (1) Hakim, Jaksa, Polisi, Panitera, dan Kurator. Sementara itu, masukan dari sektor industri dan

korporasi mengonfirmasi tingginya permintaan pasar akan lulusan yang menguasai tata kelola bersih, sehingga memperkuat profil kelompok (2) Advokat/Konsultan Hukum dan (3) *Legislative/Contract Drafter* yang berfokus pada mitigasi risiko hukum bisnis.

2. Dasar Perumusan **CPL Prodi**: *Tracer study* menunjukkan adanya tuntutan terhadap peningkatan *soft skills* lulusan pascasarjana, seperti kemampuan bernegosiasi, kemampuan menyusun rancangan hukum yang integratif, serta penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Temuan ini dijadikan dasar untuk merumuskan CPL prodi pada aspek Keterampilan Khusus dan Sikap, yakni mewajibkan lulusan memiliki kemampuan memecahkan masalah hukum berskala makro dengan pendekatan interdisipliner.
3. Dasar Pengembangan **Bahan Kajian**: Hasil pelacakan dari alumni konsentrasi Hukum Pidana dan Siber menggarisbawahi masifnya perkembangan kejahatan teknologi digital di masyarakat. Hal ini mendasari keputusan prodi untuk memperdalam bahan kajian pada mata kuliah *Tindak Pidana Ekonomi Siber* dan *Hukum Teknologi dan Informatika* di Semester III. Di sisi lain, pengguna lulusan dari korporasi meminta penguatan pemahaman kepatuhan (*legal compliance*), yang mendasari perluasan bahan kajian pada mata kuliah *Good Corporate Governance & Good Governance* di Semester II.

Ringkasan Temuan dan Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

No.	Unsur Kurikulum	Temuan Hasil Evaluasi & Tracer Study	Rencana Perbaikan / Tindak Lanjut
1	Mata Kuliah Wajib (Semester I & II)	Mata kuliah fondasi teoretis di Semester I (Teori, Sogel, Sejarah, Filsafat, Politik Hukum) dirasa sangat padat (15 SKS). Mahasiswa membutuhkan jembatan praktis agar teori tersebut langsung aplikatif terhadap isu Good Corporate Governance (GCG) di Semester II.	Sinkronisasi silabus di Semester I; contoh-contoh kasus yang diangkat dalam perkuliahan Teori Hukum dan Filsafat Hukum mulai diarahkan pada dasar-dasar akuntabilitas korporasi dan penegakan hukum tata kelola
2	Konsentrasi Hukum Bisnis (Semester III)	Pengguna lulusan mencatat bahwa profil Contract Drafter dan Arbiter memerlukan penguatan tajam pada mitigasi sengketa bisnis transnasional.	Memperluas bahan kajian pada MK Hukum Bisnis Internasional dan mengintegrasikannya dengan metode simulasi klausul arbitrase internasional
3	Konsentrasi Hukum Konstitusi (Semester III)	Terdapat masukan bahwa materi pada MK Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan perlu diselaraskan dengan MK Hukum Pemerintahan Daerah agar tidak terjadi tumpang tindih bahasan kewenangan.	Penataan ulang batas komparasi bahasan materi (mapping materi) antara struktur pemerintahan pusat dan daerah di dalam RPS masing-masing mata kuliah.
4	Konsentrasi Hukum Pidana & Siber (Semester III)	Perkembangan modus kejahatan siber bergerak sangat cepat. MK Tindak Pidana Ekonomi Siber membutuhkan studi kasus riil yang diperbarui secara real-time.	Mewajibkan dosen pengampu menggunakan referensi putusan pengadilan (yurisprudensi) kasus kejahatan siber 3 tahun terakhir serta mengundang

			praktisi cyber crime sebagai dosen tamu.
5	Tugas Akhir (Semester II & IV)	Mahasiswa telah menempuh Usulan Penelitian Tesis (3 SKS) di Semester II , namun seringkali mengalami hambatan jarak waktu ketika baru menempuh Seminar Usulan Penelitian Tesis (2 SKS) di Semester IV.	Mengoptimalkan masa bimbingan di Semester III (saat mahasiswa mengambil mata kuliah peminatan) agar draf usulan tesis tetap berjalan, sehingga pada awal Semester IV mahasiswa langsung siap melaksanakan Seminar Usulan Penelitian Tesis.

4 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

4.1 Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran atau profesi yang dapat dilakukan oleh lulusan di masyarakat atau dunia kerja setelah memenuhi seluruh capaian pembelajaran prodi dan sebagai acuan utama dalam menetapkan standar kompetensi yang diharapkan dari setiap lulusan Program Studi Magister Hukum.

Tabel 4.1. Profil Lulusan dan deskripsinya

No	Profil Lulusan (PL)	Deskripsi Profil Lulusan
PL1	Praktisi Aparat Penegak Hukum / Pejabat Hukum: Hakim, Jaksa/Penuntut Umum, Polisi, Panitera, Kurator, dan pejabat hukum lainnya	Lulusan memiliki kemampuan profesional tingkat tinggi dalam mengemban amanah penegakan hukum dan keadilan. Mereka menguasai teori dan norma hukum secara kritis, serta mampu melakukan penalaran hukum (legal reasoning) dan penemuan hukum (rechtsvinding) secara mendalam untuk memecahkan berbagai kasus hukum aktual di masyarakat. Sebagai aparat penegak hukum, lulusan mampu mengambil keputusan hukum yang objektif dan komprehensif dengan mengintegrasikan pertimbangan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Seluruh tindakan dan keputusan didasarkan pada integritas moral yang luhur, berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi kode etik profesi secara konsisten.
PL2	Profesional Hukum / Konsultan Hukum: Advokat, Konsultan Hukum, dan Analis Kebijakan Hukum (Legal Policy Analyst)	Lulusan adalah ahli hukum profesional yang mandiri dan bertanggung jawab dalam memberikan jasa pendampingan, konsultasi, serta analisis hukum. Mereka memiliki ketajaman dalam mengidentifikasi isu-isu hukum kontemporer dan merumuskan solusi hukum yang sistematis serta logis bagi kepentingan klien maupun publik. Sebagai analis, lulusan mampu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dalam membedah regulasi dan memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang aplikatif dan kontekstual. Selain itu, mereka dibekali kemampuan komunikasi efektif baik lisan maupun tulisan, serta mampu menyusun dokumen-dokumen hukum strategis (seperti legal opinion, memorandum hukum, dan laporan due diligence) secara profesional.
PL3	Perancang Dokumen Hukum (Legal Drafter): Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legislative Drafting) dan Perancang Kontrak (Contract Drafting)	Lulusan memiliki keahlian khusus dan orisinalitas dalam merancang, mengevaluasi, serta memberikan justifikasi akademik maupun praktis terhadap berbagai instrumen hukum tertulis. Di bidang publik (legislative drafting), mereka mampu menyusun naskah akademik dan draf regulasi (regeling) yang harmonis dengan sistem hukum nasional. Di bidang privat (contract drafting), mereka mampu menyusun dan menganalisis anatomi kontrak/perjanjian bisnis serta peraturan internal perusahaan yang mitigatif terhadap risiko hukum. Lulusan menguasai teknik penyusunan kalimat hukum yang presisi, logis, dan sistematis demi mewujudkan kepastian hukum dengan tetap mengedepankan etika dan nilai-mana Pancasila.
PL4	Penyelesai Sengketa, Akademisi, dan Peneliti Hukum: Konsiliator, Mediator, Arbiter, Akademisi (Dosen), dan Peneliti di Bidang Hukum.	Lulusan merupakan pemikir dan pengembang ilmu hukum yang mampu menghasilkan karya ilmiah inovatif, teruji, dan diakui secara nasional maupun internasional. Sebagai akademisi dan peneliti, mereka menguasai metodologi penelitian hukum (doktrinal maupun non-doktrinal) serta

		mampu mengelola riset mandiri atau kolaboratif dengan pendekatan multidisipliner guna menyelesaikan masalah-masalah hukum kontemporer secara kritis. Sebagai penyelesai sengketa (mediator/arbiter), lulusan memiliki keterampilan komunikasi dan negosiasi tingkat tinggi serta mampu merumuskan solusi perdamaian (win-win solution) yang adil di luar jalur pengadilan (non-litigasi), dengan dilandasi tanggung jawab profesional dan akademik yang tinggi.

4.2 Perumusan CPL

Lulusan Program Studi Magister Ilmu Hukum memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan dunia kerja, oleh sebab itu, perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dilakukan secara sistematis dan terukur. CPL adalah rumusan kualifikasi yang menggambarkan kemampuan lulusan pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.

Perumusan CPL ini mengacu pada deskriptor Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sesuai jenjang pendidikan tinggi, serta memenuhi ketentuan memenuhi Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025. CPL dirumuskan dengan mempertimbangkan profil lulusan yang diharapkan, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan keilmuan, serta kompetensi yang relevan dengan bidang hukum.

CPL terdiri dari kompetensi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Kompetensi sikap dan keterampilan umum mengikuti Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), sementara keterampilan khusus dan pengetahuan disesuaikan dengan karakteristik keilmuan hukum. Perumusan CPL dilakukan melalui proses analisis kebutuhan, konsultasi dengan pemangku kepentingan, dan pengkajian terhadap perkembangan ilmu hukum secara nasional dan global.

Tabel 4.2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

CPL	Deskripsi
CPL1	Membentuk insan yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi norma dan etika akademik
CPL2	Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan, bekerja sama dalam tim, dan inovasi, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan dan masyakarat
CPL3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum profesional, menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam merumuskan solusi hukum yang komprehensif atas permasalahan aktual dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta mampu menyusun, mengevaluasi, dan mengomunikasikan berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, sesuai keahlian yang dimilikinya.
CPL4	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum secara mendalam melalui penalaran hukum, penemuan hukum, dan penerapan norma hukum yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya.
CPL5	Mampu merumuskan dan mengembangkan solusi hukum yang sistematis, logis, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam konteks praktik profesional maupun akademik

CPL6	Mampu menyusun, mengevaluasi, dan memberikan justifikasi akademik maupun praktis terhadap berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.
CPL7	Mampu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dan metode penelitian hukum dalam menganalisis isu-isu hukum kontemporer, serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum atau desain regulasi yang kontekstual dan aplikatif
CPL8	menguasai dan menganalisis teori serta norma hukum secara kritis dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum yang tepat serta mampu memberikan solusi atas persoalan hukum secara komprehensif serta menyusun berbagai dokumen hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memorandum hukum, legal opinion, dokumen litigasi dan non-litigasi, kontrak/perjanjian, laporan due diligence, peraturan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan (regeling), dan keputusan pejabat negara (beschikking).

4.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Matriks ini menggambarkan keterkaitan erat antara Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada program studi dengan Profil Lulusan yang ditargetkan.

Tabel 4.3. Matrik hubungan Profil & CPL Prodi

Kode	Deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	PL1	PL2	PL3	PL4
CPL1	Membentuk insan yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi norma dan etika akademik.	✓	✓	✓	✓
CPL2	Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan, bekerja sama dalam tim, dan inovasi, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan dan masyarakat.	✓	✓	✓	✓
CPL3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum profesional, menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam merumuskan solusi hukum yang komprehensif atas permasalahan aktual dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta mampu menyusun, mengevaluasi, dan mengomunikasikan berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, sesuai keahlian yang dimilikinya.	✓	✓	✓	✓
CPL4	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum secara mendalam melalui penalaran hukum, penemuan hukum, dan penerapan norma hukum yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya.	✓	✓		✓
CPL5	Mampu merumuskan dan mengembangkan solusi hukum yang sistematis, logis, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam konteks praktik profesional maupun akademik.	✓	✓		✓

CPL6	Mampu menyusun, mengevaluasi, dan memberikan justifikasi akademik maupun praktis terhadap berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.	✓	✓	✓	
CPL7	Mampu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dan metode penelitian hukum dalam menganalisis isu-isu hukum kontemporer, serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum atau desain regulasi yang kontekstual dan aplikatif.		✓	✓	✓
CPL8	Menguasai dan menganalisis teori serta norma hukum secara kritis dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum yang tepat serta mampu memberikan solusi atas persoalan hukum secara komprehensif serta menyusun berbagai dokumen hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memorandum hukum, legal opinion, dokumen litigasi dan non-litigasi, kontrak/perjanjian, laporan due diligence, peraturan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan (regeling), dan keputusan pejabat negara (beschikking).	✓	✓	✓	✓

Rasionalisasi penjelasan hubungan:

1. Sikap, Tata Nilai, dan Keterampilan Umum (CPL1, CPL2, CPL3): Memiliki hubungan penuh (bersifat universal) dengan seluruh Profil Lulusan karena aspek etika Pancasila, komunikasi, adaptasi, serta berpikir logis-kritis merupakan fondasi wajib bagi setiap lulusan Magister Hukum dalam profesi apa pun.
2. CPL4 & CPL5 (Penalaran & Solusi Kasus): Sangat krusial bagi PL1 (Aparat Penegak Hukum untuk memutus/menuntut perkara), PL2 (Advokat untuk menganalisis kasus klien), dan PL4 (Mediator/Arbiter untuk merumuskan win-win solution serta Peneliti Hukum).
3. CPL6 & CPL8 (Penyusunan & Penguasaan Dokumen Hukum): Memetakan penguasaan teknis dokumen hukum secara spesifik. CPL8 memuat penguasaan jenis dokumen yang sangat luas, mulai dari dokumen litigasi (untuk PL1 & PL2), kontrak (untuk PL3), hingga regeling/beschikking (untuk PL2/PL3).
4. CPL7 (Interdisipliner & Rekomendasi Kebijakan): Lebih difokuskan pada PL2 (Analis Kebijakan Hukum), PL3 (Perancang Undang-undang/Legislative Drafter), dan PL4 (Peneliti/Akademisi) yang membutuhkan pendekatan riset mendalam serta pembuatan draf regulasi yang kontekstual.

5 Penentuan Bahan Kajian

5.1 Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Struktur keilmuan di bawah ini menggambarkan pohon keilmuan yang membagi bidang ilmu menjadi tiga lapisan utama: Core Science (Filsafat & Teori) , Institutional Identity (Pancasila & Tata Kelola), dan Applied & Peminatan Science (Bisnis, Konstitusi, Pidana/Siber).

Deskripsi Bidang Ilmu & Penentuan Bahan Kajian (*Body of Knowledge*)

Berdasarkan skema di atas, berikut adalah rincian 5 (lima) cabang/bidang ilmu utama yang dikembangkan di MIH Universitas Pancasila beserta bahan kajian yang terkandung di dalamnya:

1. Bidang Ilmu Teori dan Metodologi Hukum (*Core Jurisprudence & Methodology*)
   Dasar Keilmuan berfungsi membangun landasan epistemologis, filsafat, logika, dan penalaran hukum (legal reasoning).
   Bahan Kajian Utama:
   a. Metodologi Riset Eksploratif, Doktrinal, dan Sosio-Legal.
   b. Penulisan Ilmiah Hukum dan Analisis Yurisprudensi.

   Mata Kuliah Terkait: Teori Hukum, Sosiologi Hukum, Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah, Sejarah Hukum, Filsafat Hukum, Politik Hukum.

2. Bidang Ilmu Tata Kelola dan Hukum Pancasila (*Governance & Pancasila Jurisprudence*)
   Dasar Keilmuan yaitu Cabang keilmuan penciri universitas value yang mensinergikan etika Pancasila dengan prinsip akuntabilitas kelembagaan modern (*Good Corporate Governance*).
   Bahan Kajian Utama:
   a. Teori Etika Pancasila dan Konstitusionalisme Negara Hukum
   b. Prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, and Fairness* (TARIF) dalam instansi publik dan swasta.
   c. Hukum Mitigasi Risiko, Kepatuhan Pajak, dan Kelestarian Ekologis.

   Mata Kuliah Terkait: Etika dan Negara Hukum Pancasila, Good Corporate Governance & Good Governance, Arbitrase dan APS, Hukum Pajak, Hukum Lingkungan.

3. Bidang Ilmu Hukum Bisnis dan Perekonomian (*Corporate & International Business Law*)
   Dasar Keilmuan: Mengembangkan analisis mendalam mengenai regulasi aktivitas komersial, investasi, pembiayaan, dan perlindungan pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.
   Bahan Kajian Utama:
   a. Hukum Transaksi Bisnis Internasional dan Hukum Perdagangan Dunia (WTO/GATT)
   b. Hukum Pasar Modal, Instrumen Investasi, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB).
   c. Hukum Ketenagakerjaan dan Resolusi Sengketa Perburuhan Industri.

   Mata Kuliah Terkait: Hukum Bisnis Internasional, Hukum Pasar Modal dan Investasi, Hukum Perbankan dan IKNB, Hukum Dalam Perekonomian Nasional, Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial, Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian.

4. Bidang Ilmu Hukum Konstitusi dan Pemerintahan (*Constitutional & Administrative Law*)
   Dasar Keilmuan: Berfokus pada kajian struktur kelembagaan negara, relasi kekuasaan pusat-daerah, tata kelola keuangan publik, serta perbandingan sistem hukum tata negara.
   Bahan Kajian Utama:
   a. Teori Konstitusi Moderen dan Hukum Acara Peradilan Konstitusi.

b. Hukum Kelembagaan Negara, Birokrasi, dan Otonomi Daerah.
c. Hukum Keuangan Publik, Penganggaran, dan Hukum Kepegawaian Negara.

Mata Kuliah Terkait: Ilmu Hukum Konstitusi, Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan, Hukum Pemerintahan Daerah, Perbandingan Hukum Konstitusi, Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan, Hukum Keuangan Pusat dan Daerah.

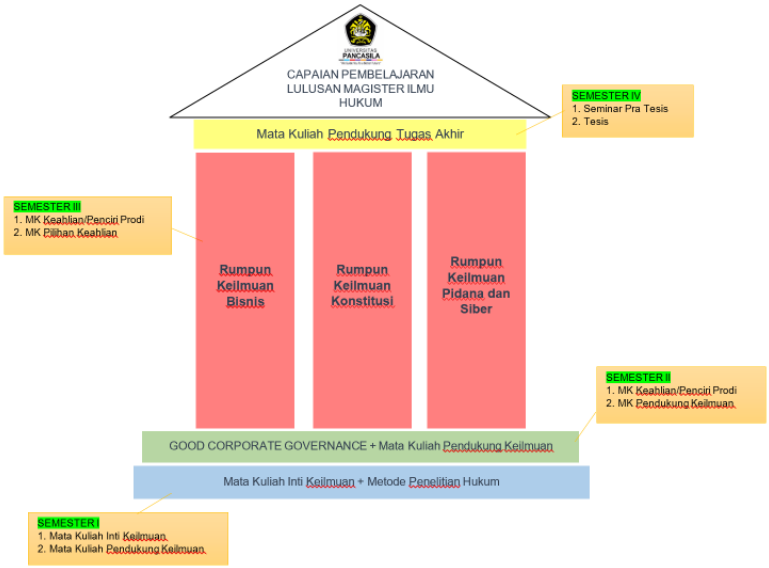
5. Bidang Ilmu Hukum Pidana Kontemporer dan Siber (*Cyber Law & Advanced Criminology*)
Dasar Keilmuan: Menjawab tantangan disrupsi teknologi melalui analisis komprehensif terhadap delik pidana modern, kejahatan berbasis digital, korporasi, dan transnasional.
Bahan Kajian Utama:
   a. Hukum Teknologi Informasi, Pembuktian Digital (*Digital Forensics*), dan Keamanan Siber.
   b. Kriminologi Kontemporer, Viktimologi, dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Criminal Liability*).
   c. Hukum Penegakan Pidana Internasional dan Ekstradisi Kasus Transnasional.

   Mata Kuliah Terkait: Hukum Teknologi dan Informatika, Tindak Pidana Ekonomi Siber, Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi, Tindak Pidana Transnasional, Kapita Selekta Pidana, Kriminologi Kontemporer.

Korelasi Bidang Ilmu (*BoK*) Terhadap Profil Lulusan MIH UP

Cabang ilmu ini dikembangkan secara sengaja untuk memastikan seluruh lulusan MIH Universitas Pancasila memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan dunia kerja, yaitu:

1. Aparat Penegak Hukum (Hakim/Jaksa/Polisi/Kurator): Didukung secara mutlak oleh penguasaan Bidang Ilmu *Core Jurisprudence*, Hukum Pidana Kontemporer/Siber, dan Hukum Konstitusi.
2. Advokat, Konsultan & Analis Kebijakan Hukum**:** Didukung oleh Bidang Ilmu Hukum Bisnis, Hukum Konstitusi, serta penguasaan penyusunan *Legal Opinion* / *Memorandum* pada mata kuliah GCG.
3. Legislative & Contract Drafter**:** Didukung oleh pendalaman metodologi, analisis perundang-undangan di rumpun Konstitusi, serta hukum perekonomian/bisnis.
4. Arbiter, Mediator & Akademisi/Peneliti**:** Diperkuat oleh instrumen mata kuliah Arbitrase & APS, Metode Penelitian Hukum, serta pengerjaan Usulan Penelitian Tesis dan Tesis.



Tabel 5.1. Bahan kajian berdasarkan CPL Prodi

Kode CPL	Pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian yang Dikembangkan
CPL 1	Membentuk insan yang beriman bertakwa, berakhlak mulia, dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta menjunjung tinggi norma dan etika akademik.	● Filsafat Pancasila dan Teori Keadilan Bermoral ● Etika Profesi Hukum Lanjut ● Integritas Akademik & Anti-Plagiarisme
CPL 2	Memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan, bekerja sama dalam tim, dan inovasi, serta mampu beradaptasi dalam lingkungan pekerjaan dan masyarakat.	● Legal Argumentation & Analisis Diskursus Hukum ● Komunikasi Hukum Efektif & Teknik Negosiasi ● Manajemen Kerja Sama Tim Hukum
CPL 3	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu hukum dan praktik hukum profesional, menunjukkan kemandirian dan tanggung jawab dalam merumuskan solusi hukum yang komprehensif atas permasalahan aktual dengan mempertimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan serta mampu menyusun, mengevaluasi, dan mengomunikasikan berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam bidang litigasi maupun non-litigasi, sesuai keahlian yang dimilikinya.	● Metodologi Penalaran Hukum (Legal Reasoning) ● Strukturisasi Dokumen Hukum Akademik (Tesis) ● Logika Hukum dan Hermeneutika Hukum
CPL 4	Mampu mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum secara mendalam melalui penalaran hukum, penemuan hukum, dan penerapan norma hukum yang tepat sesuai dengan bidang keahliannya.	● Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding) ● Analisis Yurisprudensi dan Putusan Inkrah ● Penerapan Norma Hukum Sektoral Berbasis Konsentrasi
CPL 5	Mampu merumuskan dan mengembangkan solusi hukum yang sistematis, logis, dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepastian, serta kemanfaatan hukum dalam konteks praktik profesional maupun akademik.	● Formulasi Solusi Isu Hukum Kontemporer ● Prinsip Keadilan Distributif dan Korektif dalam Kasus ● Sistematisasi Hukum Positif Nasional
CPL 6	Mampu menyusun, mengevaluasi, dan memberikan justifikasi akademik maupun praktis terhadap berbagai dokumen hukum secara profesional, baik dalam konteks litigasi maupun non-litigasi.	● Teknik Justifikasi Hukum Akademik ● Evaluasi draf Litigasi dan Non-Litigasi ● Audit Hukum (Legal Audit/Due Diligence)

Kode CPL	Pernyataan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian yang Dikembangkan
CPL 7	Mampu mengintegrasikan pendekatan interdisipliner dan metode penelitian hukum dalam menganalisis isu-isu hukum kontemporer, serta menyusun rekomendasi kebijakan hukum atau desain regulasi yang kontekstual dan aplikatif.	• Pendekatan Sosio-Legal dan Interdisipliner • Metodologi Kebijakan Publik & Desain Regulasi (Regulatory Design) • Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment)
CPL 8	Menguasai dan menganalisis teori serta norma hukum secara kritis dalam rangka menyelesaikan permasalahan atau kasus hukum melalui penalaran hukum, penemuan hukum dan penerapan hukum yang tepat serta mampu memberikan solusi atas persoalan hukum secara komprehensif serta menyusun berbagai dokumen hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada: memorandum hukum, legal opinion, dokumen litigasi dan non-litigasi, kontrak/perjanjian, laporan due diligence, peraturan internal perusahaan, peraturan perundang-undangan (regeling), dan keputusan pejabat negara (beschikking).	• Meta-Teori Hukum Kontemporer & Teori GCG • Teknik Penyusunan Dokumen Hukum Sektoral (Legal Drafting) • Doktrin Hukum Bisnis, Konstitusi, dan Siber Kontemporer • Instrumen Tindakan Hukum Pemerintah (Regeling & Beschikking)

5.2 Deskripsi Bahan Kajian

Tabel 5.2. Bahan Kajian (BK)

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK 1	Filsafat Pancasila dan Teori Keadilan Bermoral	Kajian mendalam mengenai kedudukan Pancasila sebagai cita hukum (rechtsidee), pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum negara. Bahan kajian ini membedah nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan untuk dtransformasikan ke dalam sistem hukum positif, serta menganalisis berbagai mazhab teori keadilan substantif yang berbasis pada moralitas kebangsaan.
BK 2	Etika Profesi Hukum Lanjut	Studi komparatif dan aplikatif mengenai kode etik profesi hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Kurator, Notaris, dan Arbiter) dalam skala nasional maupun internasional. Fokus pembelajaran diarahkan pada internalisasi integritas diri, mitigasi pelanggaran malpraktik hukum, benturan kepentingan (conflict of interest), serta penegakan moralitas dalam jabatan publik dan swasta demi mewujudkan aparatur hukum yang bersih.
BK 3	Integritas Akademik & Anti-Plagiarisme	Kajian mengenai norma, asas, dan regulasi yang mengatur tentang kebenaran ilmiah dan kejujuran akademik. Bahan kajian ini membekali mahasiswa dengan pemahaman

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
		mendalam mengenai batasan plagiarisme, teknik sitasi standar internasional, pengelolaan orisinalitas gagasan hukum, serta tanggung jawab yuridis dan moral seorang akademisi maupun peneliti hukum dalam mempublikasikan karya ilmiah.
BK 4	Legal Argumentation & Analisis Diskursus Hukum	Pengembangan keterampilan komunikasi hukum tingkat lanjut, baik lisan maupun tulisan. Bahan kajian ini mencakup metode dialog socrates, teknik debat hukum, retorika persidangan, negosiasi kontrak bisnis, serta analisis wacana kritis terhadap perdebatan norma hukum di ruang publik guna meyakinkan para pihak atau lembaga peradilan.
BK 5	Metodologi Penalaran Hukum (Legal Reasoning)	Studi mengenai struktur berpikir logis dalam ilmu hukum menggunakan metode silogisme (deduksi dan induksi), penafsiran hukum (gramatikal, sistematis, historis, teleologis), serta konstruksi hukum (analogi, argumentum a contrario, penghalusan hukum). Mahasiswa dilatih untuk menguraikan fakta hukum, menemukan hukum yang relevan, dan menarik kesimpulan hukum yang valid guna memecahkan problematika yang kompleks.
BK 6	Strukturisasi Dokumen Hukum Akademik	Pendalaman teknik penyusunan draf usulan penelitian tesis, tesis, dan artikel jurnal ilmiah yang memenuhi standar metodologi riset hukum pascasarjana. Pembahasan meliputi perumusan isu hukum (legal issues) yang tajam, penentuan pendekatan penelitian (statute, case, conceptual approach), penyusunan kerangka teoretis, hingga penarikan kesimpulan yang presisi.
BK 7	Teori Penemuan Hukum (Rechtsvinding)	Kajian mengenai peran hakim dan praktisi hukum dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Bahan kajian ini berfokus pada penyelesaian sengketa apabila terjadi kekosongan hukum (lacunae), pertentangan norma, atau norma kabur dalam perundang-undangan formal demi terciptanya kepastian hukum yang progresif.
BK 8	Pendekatan Sosio-Legal dan Interdisipliner	Integrasi analisis ilmu hukum dengan rumpun ilmu non-hukum lainnya (sosiologi, ekonomi, kriminologi, psikologi, dan teknologi). Bahan kajian ini melatih mahasiswa untuk tidak hanya melihat hukum secara tekstual-normatif (law in books), melainkan juga secara empiris-kontekstual (law in action) untuk membedah efektivitas hukum, perilaku sosial, dan dampak implementasi suatu regulasi di masyarakat.
BK 9	Metodologi Kebijakan Publik & Desain Regulasi	Pembekalan teoretis dan praktis mengenai siklus pembentukan undang-undang, peraturan daerah, maupun regulasi internal korporasi. Bahan kajian ini membedah teori perundang-undangan (gesetzgebungslehre), asas pembentukan regulasi yang baik, metode penyusunan naskah akademik, serta teknik penulisan pasal demi pasal (legislative drafting) secara sistematis.
BK 10	Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment)	Metodologi evaluasi pra dan pasca pemberlakuan suatu kebijakan atau peraturan perundang-undangan menggunakan metode RIA (Regulatory Impact Assessment). Kajian difokuskan pada analisis biaya-manfaat (cost-benefit

Kode	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
		analysis), identifikasi dampak risiko sosial-ekonomi, serta analisis kepatuhan pemangku kepentingan terhadap regulasi yang dirancang.
BK 11	Meta-Teori Hukum Kontemporer & Teori GCG	Kajian tingkat tinggi mengenai perkembangan mazhab-mazhab teori hukum modern dan integrasinya dengan prinsip keunikan prodi, yaitu Good Corporate Governance (GCG) dan Good Governance. Bahan kajian membedah aspek keterbukaan (transparency), akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran (fairness) baik di dalam struktur tata kelola perusahaan maupun kelembagaan publik.
BK 12	Teknik Penyusunan Dokumen Hukum Sektoral	Pelatihan praktis penyusunan berbagai dokumen hukum standar profesional (legal drafting) non-legislatif. Ruang lingkup keahlian mencakup pembuatan pendapat hukum (legal opinion), memorandum hukum, draf kontrak bisnis (nasional dan internasional), laporan uji tuntas hukum (legal due diligence), serta dokumen-dokumen administrasi peradilan (gugatan, memori banding/kasasi).
BK 13	Doktrin Hukum Bisnis, Konstitusi, dan Siber Kontemporer	Pendalaman materi sektoral yang disesuaikan dengan tiga peminatan kurikulum. Mencakup doktrin kejahatan korporasi, regulasi pasar modal/perbankan (Hukum Bisnis); teori konstitusionalisme, perbandingan kelembagaan negara, keuangan pusat-daerah (Hukum Konstitusi); serta doktrin hukum siber, pembuktian digital, tindak pidana teknologi dan lintas batas (Hukum Pidana dan Siber).
BK 14	Instrumen Tindakan Hukum Pemerintah	Kajian mengenai keabsahan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada produk-produk hukum administrasi negara. Bahan kajian membedah karakteristik, kekuatan mengikat, prosedur pengujian, dan tanggung jawab hukum atas penerbitan peraturan kebijakan (regeling), keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret-individual (beschikking), serta asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

6 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks

Tabel 6.1. Matrik CPL dan Mata kuliah Baru

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN (BK)	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
13211 026	Teori Hukum	BK 5, BK 11	✓		✓	✓				✓
13211 024	Sosiologi Hukum	BK 8	✓		✓				✓	✓
13212 028	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah	BK 3, BK 6, BK 8		✓	✓				✓	✓
13211 004	Sejarah Hukum	BK 13	✓		✓					✓
13211 005	Filsafat Hukum	BK 1, BK 11	✓		✓		✓			✓
13212 027	Politik Hukum	BK 9, BK 10	✓		✓				✓	✓
13222 036	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	BK 4, BK 12		✓	✓	✓		✓		✓
13223 034	Hukum Pajak	BK 13			✓	✓	✓			✓
13226 037	Etika dan Negara Hukum Pancasila	BK 1, BK 2	✓	✓						✓
13226 029	Good Corporate Governance & Good Governance	BK 11	✓		✓	✓				✓
13222 035	Hukum Lingkungan	BK 8, BK 13			✓	✓	✓		✓	

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN (BK)	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
13223 011	Usulan Penelitian Tesis	BK 6		✓	✓				✓	
13232 029	Hukum Bisnis Internasional	BK 12, BK 13			✓	✓	✓	✓		✓
13236 032	Hukum Pasar Modal dan Investasi	BK 13			✓	✓	✓	✓		✓
13236 033	Hukum Perbankan dan IKNB	BK 11, BK 13			✓	✓	✓	✓		✓
13236 027	Hukum Dalam Perekonomian Nasional	BK 1, BK 13	✓		✓	✓				✓
13232 019	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial	BK 4, BK 12		✓	✓	✓		✓		✓
13232 013	Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian	BK 13			✓	✓	✓			✓
13231 039	Ilmu Hukum Konstitusi	BK 1, BK 13	✓		✓	✓				✓
13236 037	Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan	BK 14			✓	✓	✓	✓		✓
13232 045	Hukum Pemerintahan Daerah	BK 9, BK 14			✓	✓	✓			✓
13233 042	Perbandingan Hukum Konstitusi	BK 13			✓	✓			✓	✓
13232 040	Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan	BK 13, BK 14			✓	✓	✓			✓
13232 042	Hukum Keuangan Pusat dan Daerah	BK 13, BK 14			✓	✓	✓	✓		✓

KODE MK	NAMA MATA KULIAH	BAHAN KAJIAN (BK)	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
13234 045	Hukum Teknologi dan Informatika	BK 8, BK 13			✓	✓	✓		✓	✓
13231 055	Tindak Pidana Ekonomi Siber	BK 13			✓	✓	✓			✓
13233 022	Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi	BK 11, BK 13			✓	✓	✓			✓
13236 052	Tindak Pidana Transnasional	BK 13			✓	✓	✓		✓	
13232 058	Kapita Selekta Pidana	BK 7, BK 13	✓		✓	✓	✓			✓
13234 057	Kriminologi Kontemporer	BK 8, BK 13			✓	✓			✓	✓
13244 024	Seminar Usulan Penelitian Tesis	BK 4, BK 6		✓	✓				✓	✓
13244 021	Tesis	BK 1 s.d BK 14	✓	✓	✓	✓	✓			

Tabel 6.2. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
SEMESTER I (SATU)							
1	13211026	Teori Hukum	CPL1, CPL 3, CPL 4, CPL 8	Mengkaji struktur internal ilmu hukum, perbedaan mendasar dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Analisis kritis terhadap validitas norma hukum. Pokok Bahasan: Positivisme Hukum, Pure Theory of Law, Realisme Hukum, Critical Legal Studies, Hukum dan Moralitas, Penemuan Hukum Kontemporer.			3
2	13211024	Sosiologi Hukum	CPL 1, CPL 3, CPL 7, CPL 8	Menganalisis efektivitas hukum empiris di tengah struktur sosial masyarakat, hukum sebagai instrumen perubahan, serta stratifikasi penegakan hukum. Pokok Bahasan: Teori Struktural Fungsional, Social Engineering (Satjipto Rahardjo & Roscoe Pound), Pluralisme Hukum, Efektivitas Sistem Peradilan, Sosiologi Konflik.			2
3	13212028	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah	CPL 2, CPL 3, CPL 7, CPL 8	Metodologi komprehensif penyusunan karya ilmiah magister. Pendekatan penelitian hukum normatif (doctrinal) dan empiris (non-doctrinal). Pokok Bahasan: Perumusan Isu Hukum, Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Kasus/Komparatif, Teknik Sitasi Ilmiah, Validasi Orisinalitas (Anti-Plagiarisme).			3

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
4	13211004	Sejarah Hukum	CPL 1, CPL 3, CPL 8	Penelusuran perkembangan akar sejarah institusi hukum dan kodifikasi hukum eropa kontinental serta perkembangannya di yurisdiksi Indonesia. Pokok Bahasan: Mazhab Sejarah Von Savigny, Sejarah Pluralisme Hukum Indonesia, Evolusi Sistem Peradilan Kolonial ke Nasional, Perkembangan Konstitusi.			2
5	13211005	Filsafat Hukum	CPL 1, CPL 3, CPL 5, CPL 8	Refleksi kefilsafatan mengenai hakikat hukum (ontologi), nilai keadilan (aksiologi), guna membentuk karakter sarjana yang berintegritas moral tinggi. Pokok Bahasan: Teori Keadilan (Aristoteles, John Rawls), Hak Asasi Manusia, Moralitas Penegakan Hukum, Etika Profesi Hukum, Pancasila sebagai Cita Hukum (Rechtsidee).			3
6	13212027	Politik Hukum	CPL 1, CPL 3, CPL 7, CPL 8	Mempelajari arah kebijakan legislasi resmi negara dan konstelasi politik yang memengaruhi karakter pembentukan peraturan perundang-undangan. Pokok Bahasan: Produk Hukum Responsif vs Ortodoks (Mahfud MD), Mekanisme Prolegnas, Teknik Hubungan Legislatif, Analisis Dampak Regulasi (RIA), Konsep Omnibus Law.			2
SEMESTER II (DUA)							
7	13222036	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 6, CPL 8	Studi mekanisme resolusi konflik di luar pengadilan sipil formal melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan forum arbitrase komersial. Pokok Bahasan: Analisis UU No. 30 Tahun 1999, Klausul Arbitrase, Hukum Acara Arbitrase Nasional (BANI), Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional, Mediasi Pengadilan.			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
8	13223034	Hukum Pajak	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Pendalaman hukum pemungutan kontribusi wajib wajib pajak, perlindungan hak wajib pajak, dan penanganan perkara tata usaha perpajakan. Pokok Bahasan: Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan Fiskal Korporasi, Kejahatan Pajak (Tax Evasion), Hukum Acara Peradilan Pajak, Tax Amnesty.			2
9	13226037	Etika dan Negara Hukum Pancasila	CPL 1, CPL 2, CPL 8	Mengelaborasi pilar filosofis tata kelola negara hukum konstitusional yang bersendikan karakter budaya luhur nilai ideologi Pancasila. Pokok Bahasan: Konsep Rechtstaat vs Rule of Law vs Negara Hukum Pancasila, Etika Jabatan Publik, Integritas Hukum Konstitusional, Hubungan Moralitas dan Kekuasaan.			3
10	13226029	Good Corporate Governance & Good Governance	CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 8	Analisis komparatif penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, independensi, dan keadilan di sektor administrasi publik maupun korporasi bisnis. Pokok Bahasan: Fiduciary Duties Direksi, Reformasi Birokrasi Publik, Corporate Social Responsibility (CSR), Sistem Pengendalian Internal, Manajemen Risiko Kepatuhan Hukum.			3
11	13222035	Hukum Lingkungan	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 7	Instrumen hukum dan hak gugat lingkungan guna perlindungan ekosistem dan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Pokok Bahasan: AMDAL/Persetujuan Lingkungan, Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability), Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Legal Standing), Penegakan Pidana Lingkungan Terpadu.			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
12	13223011	Usulan Penelitian Tesis	CPL 2, CPL 3, CPL 7	Tahap rancangan proposal awal penelitian mandiri terbimbing guna memformulasikan masalah hukum kritis yang layak dikembangkan ke dalam naskah tesis resmi. Pokok Bahasan: Konstruksi Latar Belakang Masalah, Penentuan Originalitas Gagasan Ilmiah, Kerangka Teoretis/Konseptual, Matriks Operasional Metode Penelitian.			3
SEMESTER III (TIGA) Hukum Bisnis							
13	13232029	Hukum Bisnis Internasional	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 8	Regulasi hukum transaksi ekonomi global lintas batas teritorial, hukum organisasi dagang dunia (WTO), dan perlindungan investasi komersial asing. Pokok Bahasan: Hukum Kontrak Internasional (CISG), Letter of Credit (L/C), Hukum Kepabeanan/GATT, Hambatan Non-Tarif, Penyelesaian Sengketa Investasi (ICSID).			2
14	13236032	Hukum Pasar Modal dan Investasi	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 8	Mengkaji aspek legal penawaran umum perdana saham korporasi (IPO), perdagangan sekuritas efek, perlindungan investor minoritas, dan regulasi OJK. Pokok Bahasan: Mekanisme Due Diligence Emiten, Kejahatan Insider Trading, Market Manipulation, Reksa Dana, Doktrin Keterbukaan Informasi Pasar Modal.			3
15	13236033	Hukum Perbankan dan IKNB	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 8	Mendalami regulasi perbankan konvensional dan syariah, serta Industri Keuangan Non-Bank (asuransi, pembiayaan modal ventura, tekfin/P2P lending).			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
				Pokok Bahasan: Rahasia Bank, Hukum Jaminan dan Agunan Kredit, Likuidasi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Regulasi FinTech Financial Inclusion, Mitigasi Gagal Bayar.			
16	13236027	Hukum Dalam Perekonomian Nasional	CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 8	Mengkaji kedudukan hukum negara dalam intervensi sistem ekonomi pasar berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 serta perlindungan iklim usaha yang adil. Pokok Bahasan: Konsep Penguasaan Negara terhadap Sumber Daya, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (KPPU), Regulasi Perlindungan Konsumen.			3
17	13232019	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial	CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 6, CPL 8	Mendalami tata cara perundingan dan penyelesaian perselisihan ketenagakerjaan antara buruh/pekerja dengan manajemen perusahaan pengusaha. Pokok Bahasan: Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Mediasi Tripartit Ketenagakerjaan, Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).			2
18	13232013	Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Mengkaji dimensi hukum pidana khusus terhadap penyimpangan dan fraud tata kelola keuangan yang merugikan sektor ekonomi publik korporat. Pokok Bahasan: Tindak Pidana Korupsi, Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU/Money Laundering), Rekayasa Fraud Kepailitan Komersial, Pertanggungjawaban Korporasi.			2
SEMESTER III (TIGA) Hukum Konstitusi							

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
19	13231039	Ilmu Hukum Konstitusi	CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 8	Studi mendalam filsafat ketatanegaraan, supremasi hukum tertinggi negara, penafsiran konstitusi, dan mekanisme kontrol peradilan konstitusi. Pokok Bahasan: Teori Kedaulatan Rakyat, Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Judicial Review di MK), Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara, Sengketa Lembaga Negara.			3
20	13236037	Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 8	Mengkaji fungsi kemandirian struktur organ lembaga eksekutif, legislatif, yudisial, serta komisi-komisi negara independen auxiliary bodies. Pokok Bahasan: Check and Balances System, Legalitas Diskresi Administrasi, Pembatasan Kekuasaan Negara, Hukum Acara Gugatan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).			3
21	13232045	Hukum Pemerintahan Daerah	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Mendalami tata kelola pembagian urusan pemerintahan sipil pusat dan daerah berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam bingkai NKRI. Pokok Bahasan: Desentralisasi Kekuasaan, Teknik Perancangan Peraturan Daerah (Perda), Pembatalan Peraturan Kepala Daerah, Konflik Kewenangan Horisontal-Vertikal.			2
22	13233042	Perbandingan Hukum Konstitusi	CPL 3, CPL 4, CPL 7, CPL 8	Studi komparatif struktur ketatanegaraan antara sistem pemerintahan presidensial, parlementer, maupun semi-presidensial di berbagai belahan dunia. Pokok Bahasan: Perbandingan Mahkamah Konstitusi Global, Amandemen Konstitusi Lintas			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
				Negara, Pola Checks and Balances Internasional, Konstitusionalisme Transnasional.			
23	13232040	Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Mengkaji aspek legalitas kedudukan aparatur sipil negara (ASN) serta sistem jaminan ketenagakerjaan sektor publik nasional publik korporat. Pokok Bahasan: Regulasi Manajemen ASN, Pelanggaran Kode Etik Birokrasi, Sengketa Kepegawaian Tata Usaha Negara, Hak-hak Normatif Pekerja Publik.			2
24	13232042	Hukum Keuangan Pusat dan Daerah	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 8	Mendalami tata kelola penyusunan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yuridis atas APBN dan APBD berdasarkan UU Keuangan Negara. Pokok Bahasan: Hubungan Fiskal Pusat-Daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK/DAU), Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kerugian Negara vs Risiko Bisnis Publik.			2
SEMESTER III (TIGA) Hukum Pidana dan Siber							
25	13234045	Hukum Teknologi dan Informatika	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 7, CPL 8	Mengkaji konvergensi norma hukum perdata dan publik dalam kerangka pemanfaatan sistem elektronik, transaksi e-commerce, dan kedaulatan data. Pokok Bahasan: Analisis UU ITE, Keabsahan Tanda Tangan Digital, UU Pelindungan Data Pribadi (PDP), Pertanggungjawaban Penyedia Platform Medsos.			2
26	13231055	Tindak Pidana Ekonomi Siber	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Menganalisis anatomi modus operandi kejahatan kerah putih bermotif ekonomi finansial yang			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
				memanfaatkan jaringan teknologi informasi siber modern. Pokok Bahasan: Kejahatan Phishing Perbankan, Ransomware, Pencucian Uang Kripto (Crypto Laundering), Fraud FinTech, Pembobolan Deface Sistem Pembayaran Digital.			
27	13233022	Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Mendalami doktrin pemidanaan badan hukum korporasi sebagai subjek hukum mandiri di samping pengurus, serta jenis penjatuhan sanksi pidananya. Pokok Bahasan: Identification Doctrine, Vicarious Liability, Strict Liability Korporasi, Penjatuhan Denda Yuridis, Pembubaran/Penyitaan Aset Perusahaan Fraud.			3
28	13236052	Tindak Pidana Transnasional	CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 7	Studi penanganan kasus kejahatan terorganisir lintas teritorial negara (organized crime) dan instrumen kerja sama penegakan hukum peradilan pidana internasional. Pokok Bahasan: Perjanjian Ekstradisi, Mutual Legal Assistance (MLA), Penyelundupan Manusia (Human Trafficking), Tindak Pidana Terorisme, Peran Interpol Cyber.			3
29	13232058	Kapita Selekta Pidana	CPL 1, CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 8	Pembahasan komprehensif atas isu-isu krusial penegakan sistem peradilan pidana kontemporer pasca-berlakunya kodifikasi KUHP Nasional baru. Pokok Bahasan: Rekonstruksi Hukum Pidana Adat (The Living Law), Keadilan Restoratif (Restorative Justice), Alternatif Pidana Pengawasan, Pidana Kerja Sosial.			2

No	Kode MK	Nama MK	Beberapa butir CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	Estimasi waktu (jam)		Bobot sks
					Teori	Praktek	
30	13234057	Kriminologi Kontemporer	CPL 3, CPL 4, CPL 6, CPL 8	Analisis kritis etiologi kriminal (sebab terjadinya kejahatan), korban kejahatan (viktimologi), dan reaksi sosial di era modern digitalisasi kemasyarakatan. Pokok Bahasan: Teori Anomie Modern, Cyber Victimology, Konstruksi Labeling Kejahatan di Media Sosial, Kebijakan Non-Penal dalam Pencegahan Kriminalitas.			2
SEMESTER IV (EMPAT)							
31	13244024	Seminar Usulan Penelitian Tesis	CPL 2, CPL 3, CPL 7, CPL 8	Forum ujian akademik terbuka di hadapan dewan penguji untuk mempresentasikan kelayakan ilmiah, ketepatan teori, dan orisinalitas rancangan riset hukum mahasiswa. Fokus Pengujian: Argumentasi Yuridis Isu Hukum, Ketepatan Metode Pendekatan Kasus/Normatif, Validitas Kerangka Berpikir Analitis.			2
32	13244021	Tesis	CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4, CPL 5	Karya ilmiah puncak hasil riset mandiri mendalam yang berkontribusi nyata bagi pembaharuan khazanah keilmuan maupun solusi problematika hukum makro masyarakat. Persyaratan Akhir: Naskah Tesis Lengkap, Lulus Uji Plagiarisme Ketat (Turnitin), serta Penyusunan Artikel Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional/Internasional.			4
						Total jumlah sks	**50**

7 Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

7.1 Struktur Kurikulum

Tabel 7.1. Matrik Struktur Matakuliah dalam Kurikulum Program Studi

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM MAGISTER		
			MK Wajib	MK Pilihan	MKWK
IV	6	2	Seminar Usulan Penelitian Tesis Kode: 13244024 Bobot: 2 SKS (Tugas Akhir) Tesis Kode: 13244021 Bobot: 4 SKS (Tugas Akhir)		
III	14	6	Hukum Bisnis Internasional Kode: 13232029 Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan) Hukum Pasar Modal dan Investasi Kode: 13236032 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan) Hukum Perbankan dan IKNB Kode: 13236033 Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan) Hukum Dalam Perekonomian Nasional Kode: 13236027 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan)	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial Kode: 13232019 Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan) Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian Kode: 13232013 Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan)	
			Ilmu Hukum Konstitusi Kode: 13231039 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan) Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan Kode: 13236037 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan) Hukum Pemerintahan Daerah Kode: 13232045	Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan Kode: 13232040 Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan) Hukum Keuangan Pusat dan Daerah Kode: 13232042	

			Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan) Perbandingan Hukum Konstitusi Kode: 13233042 Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan)	Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan)	
			Hukum Teknologi dan Informatika Kode: 13234045 Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan) Tindak Pidana Ekonomi Siber Kode: 13231055 Bobot: 2 SKS (Wajib Peminatan) Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi Kode: 13233022 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan) Tindak Pidana Transnasional Kode: 13236052 Bobot: 3 SKS (Wajib Peminatan)	Kapita Selekta Pidana Kode: 13232058 Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan) Kriminologi Kontemporer Kode: 13234057 Bobot: 2 SKS (Pilihan Peminatan)	
II	15	6	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Kode: 13222036 Bobot: 2 SKS Hukum Pajak Kode: 13223034 Bobot: 2 SKS Etika dan Negara Hukum Pancasila Kode: 13226037 Bobot: 3 SKS Good Corporate Governance & Good Governance Kode: 13226029 Bobot: 3 SKS Hukum Lingkungan Kode: 13222035 Bobot: 2 SKS		

			Usulan Penelitian Tesis Kode: 13223011 Bobot: 3 SKS		
I	15	6			Teori Hukum Kode: 13211026 Bobot: 3 SKS Sosiologi Hukum Kode: 13211024 Bobot: 2 SKS Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah Kode: 13212028 Bobot: 3 SKS Sejarah Hukum Kode: 13211004 Bobot: 2 SKS Filsafat Hukum Kode: 13211005 Bobot: 3 SKS Politik Hukum Kode: 13212027 Bobot: 2 SKS
Total	50	20			

7.2 Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI

Semester	Kode MK	Nama Mata Kuliah	CPL1	CPL2	CPL3	CPL4	CPL5	CPL6	CPL7	CPL8
I	13211026	Teori Hukum	✓		✓	✓				✓
	13211024	Sosiologi Hukum	✓		✓				✓	✓
	13212028	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah		✓	✓				✓	✓
	13211004	Sejarah Hukum	✓		✓					✓
	13211005	Filsafat Hukum	✓		✓		✓			✓
	13212027	Politik Hukum	✓		✓				✓	✓
II	13222036	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa		✓	✓	✓		✓		✓
	13223034	Hukum Pajak			✓	✓	✓			✓
	13226037	Etika dan Negara Hukum Pancasila	✓	✓						✓

	13226029	Good Corporate Governance & Good Governance	✓		✓	✓				✓
	13222035	Hukum Lingkungan			✓	✓	✓		✓	
	13223011	Usulan Penelitian Tesis		✓	✓				✓	
III (Hukum Bisnis)	13232029	Hukum Bisnis Internasional			✓	✓	✓	✓		✓
	13236032	Hukum Pasar Modal dan Investasi			✓	✓	✓	✓		✓
	13236033	Hukum Perbankan dan IKNB			✓	✓	✓	✓		✓
	13236027	Hukum Dalam Perekonomian Nasional	✓		✓	✓				✓
	13232019	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial		✓	✓	✓		✓		✓
	13232013	Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian			✓	✓	✓			✓
III (Hukum Konstitusi)	13231039	Ilmu Hukum Konstitusi	✓		✓	✓				✓
	13236037	Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan			✓	✓	✓	✓		✓
	13232045	Hukum Pemerintahan Daerah			✓	✓	✓			✓
	13233042	Perbandingan Hukum Konstitusi			✓	✓			✓	✓
	13232040	Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan			✓	✓	✓			✓
	13232042	Hukum Keuangan Pusat dan Daerah			✓	✓	✓	✓		✓
III (Hukum Pidana & Siber)	13234045	Hukum Teknologi dan Informatika			✓	✓	✓		✓	✓
	13231055	Tindak Pidana Ekonomi Siber			✓	✓	✓			✓
	13233022	Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi			✓	✓	✓			✓
	13236052	Tindak Pidana Transnasional			✓	✓	✓		✓	
	13232058	Kapita Selekta Pidana	✓		✓	✓	✓			✓
	13234057	Kriminologi Kontemporer			✓	✓			✓	✓
Semester IV	13244024	Seminar Usulan Penelitian Tesis		✓	✓				✓	✓
	13244021	Tesis	✓	✓	✓	✓	✓			

PETA KURIKULUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

SMT I	SMT II	SMT III Hukum Bisnis	SMT IV
Teori Hukum	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	Hukum Bisnis Internasional	Seminar Usulan Penelitian Tesis
Sosiologi Hukum	Hukum Pajak	Hukum Pasar Modal dan Investasi	Tesis
Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah	Etika dan Negara Hukum Pancasila	Hukum Perbankan dan IKNB	
Sejarah Hukum	Good Corporate Governance & Good Governance	Hukum Dalam Perekonomian Nasional	
Filsafat Hukum	Hukum Lingkungan	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial	
Politik Hukum	Usulan Penelitian Tesis	Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian	
		SMT III Hukum Konstitusi	
		Ilmu Hukum Konstitusi	
		Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan	
		Hukum Pemerintahan Daerah	
		Perbandingan Hukum Konstitusi	
		Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan	
		Hukum Keuangan Pusat dan Daerah	
		SMT III Hukum Pidana dan Siber	
		Hukum Teknologi dan Informatika	
		Tindak Pidana Ekonomi Siber	
		Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi	
		Tindak Pidana Transnasional	
		Kapita Selekta Pidana	
		Krimonologi Kotemporer	
15 sks	**15 sks**	**14 sks**	**6 sks**

JUMLAH SKS TOTAL - 50 SKS

8 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Tabel 8.1. Daftar Mata kuliah per semester

Semester I (satu)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13211026	Teori Hukum	3	W
2	13211024	Sosiologi Hukum	2	W
3	13212028	Metode Penelitian Hukum & Penulisan Ilmiah	3	W
4	13211004	Sejarah Hukum	2	W
5	13211005	Filsafat Hukum	3	W
6	13212027	Politik Hukum	2	W
TOTAL SKS			15	

Semester II (Dua)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13222036	Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	2	W
2	13223034	Hukum Pajak	2	W
3	13226037	Etika dan Negara Hukum Pancasila	3	W
4	13226029	Good Corporate Governance & Good Governance	3	W
5	13222035	Hukum Lingkungan	2	W
6	13223011	Usulan Penelitian Tesis	3	W
TOTAL SKS			15	

Konsentrasi:
Hukum Bisnis
Semester III (tiga)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13232029	Hukum Bisnis Internasional	2	WP
2	13236032	Hukum Pasar Modal dan Investasi	3	WP
3	13236033	Hukum Perbankan dan IKNB	2	WP
4	13236027	Hukum Dalam Perekonomian Nasional	3	WP
5	13232019	Hukum Penyelesaian Hubungan Industrial	2	PP
6	13232013	Hukum Pidana dan Kegiatan Perekonomian	2	PP
TOTAL SKS			14	

Konsentrasi: Hukum Konstitusi
Semester III (tiga)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13231039	Ilmu Hukum Konstitusi	3	WP
2	13236037	Hukum Badan-Badan Negara dan Pemerintahan	3	WP
3	13232045	Hukum Pemerintahan Daerah	2	WP
4	13233042	Perbandingan Hukum Konstitusi	2	WP
5	13232040	Hukum Kepegawaian dan Ketenagakerjaan	2	PP

6	13232042	Hukum Keuangan Pusat dan Daerah	2	PP
TOTAL SKS			14	

Konsentrasi: Hukum Pidana dan Siber
Semester III (tiga)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13234045	Hukum Teknologi dan Informatika	2	WP
2	13231055	Tindak Pidana Ekonomi Siber	2	WP
3	13233022	Tindak Pidana dan Kejahatan Korporasi	3	WP
4	13236052	Tindak Pidana Transnasional	3	WP
5	13232058	Kapita Selekta Pidana	2	PP
6	13234057	Krimonologi Kotemporer	2	PP
TOTAL SKS			14	

Semester IV (empat)

No	Kode Matakuliah	Nama MataKuliah	sks	Status
1	13244024	Seminar Usulan Penelitian Tesis	2	TA
2	13244021	Tesis	4	TA
TOTAL SKS			6	
TOTAL SELURUH SKS 4 SEMESTER			**50**	

***Keterangan:**

W **:** Mata kuliah Wajib
WP **:** Mata Kuliah Wajib Peminatan
PP **:** Mata Kuliah Pilihan Peminatan
TA **:** Mata Kuliah Tugas Akhir

9 Pengelolaan & mekanisme pelaksanaan kurikulum

Berikut adalah rencana pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum Magister Ilmu Hukum (MIH) Universitas Pancasila dengan mengacu pada siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan):

P (Penetapan) – Penetapan Standar Kurikulum

Langkah awal adalah menetapkan landasan hukum, target capaian, dan struktur kurikulum yang wajib dipenuhi.

1. Penetapan Profil Lulusan & CPL: Menetapkan 8 butir Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Magister Ilmu Hukum yang mencakup Sikap (CPL1), Keterampilan Umum (CPL2, CPL3), Keterampilan Khusus (CPL4, CPL5, CPL6, CPL7), dan Penguasaan Pengetahuan (CPL8).
2. Optimalisasi Beban Kerja: Menetapkan aturan bahwa setiap mata kuliah maksimal hanya dibebani 5 CPL demi menjaga kedalaman materi dan rasionalitas asesmen mahasiswa.
3. Struktur Kurikulum: Menetapkan total kelulusan sebesar 50 SKS yang tersebar ke dalam 4 Semester:
    a. Semester I: 6 Mata Kuliah Wajib (15 SKS).
    b. Semester II: 6 Mata Kuliah Wajib termasuk Usulan Penelitian Tesis (15 SKS).
    c. Semester III: Pengelompokan berdasarkan 3 Konsentrasi Minat (Hukum Bisnis, Hukum Konstitusi, Hukum Pidana & Siber) masing-masing 14 SKS.
    d. Semester IV: Tugas Akhir (Seminar Usulan Penelitian Tesis & Tesis) sebesar 6 SKS.
4. Pengesahan Dokumen: Penerbitan Surat Keputusan (SK) Dekan/Rektor terkait pemberlakuan Kurikulum MIH 2025.

P (Pelaksanaan) – Mekanisme Pelaksanaan Pembelajaran

Tahap implementasi operasional dari standar kurikulum yang telah ditetapkan agar proses belajar mengajar berjalan sistematis.

1. Penyusunan Perangkat Pembelajaran: Setiap dosen pengampu wajib menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Bahan Kajian (BK), serta instrumen penilaian yang selaras dengan pemetaan matriks CPL teroptimasi.
2. Proses Perkuliahan: Pelaksanaan kuliah terjadwal selama 16 minggu per semester (termasuk UTS dan UAS).
   Metode pembelajaran berpusat pada mahasiswa (*Student-Centered Learning*) melalui penalaran hukum, analisis kasus, dan penulisan ilmiah.
3. Pelaksanaan Konsentrasi (Semester III): Mahasiswa diarahkan memilih salah satu klaster keahlian khusus sesuai minat:
    a. Hukum Bisnis (fokus: Pasar Modal, Perbankan, Hubungan Industrial).
    b. Hukum Konstitusi (fokus: Kelembagaan Negara, Pemda, Keuangan Negara).
    c. Hukum Pidana & Siber (fokus: Ekonomi Siber, Kejahatan Korporasi, Transnasional).
4. Bimbingan Tugas Akhir (Semester IV): Pelaksanaan Seminar Usulan Penelitian Tesis secara terbuka dan riset mandiri Tesis di bawah supervisi Komisi Pembimbing.

E (Evaluasi) – Evaluasi Berkala Kurikulum

Proses monitoring untuk mengukur kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan standar CPL yang telah ditetapkan.

1. Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa: Penilaian ketercapaian CPL mahasiswa pada akhir tiap semester menggunakan instrumen ujian, legal opinion/memorandum, atau draf regulasi sesuai karakteristik mata kuliah.
2. Asesmen Mutu Internal (AMI): Melakukan audit kurikulum tahunan sebagai pemenuhan dokumen evaluasi instrumen AMI berbasis standar ISO.

3. Audit Kecukupan CPL: Memastikan tidak ada mata kuliah yang melanggar batas beban dengan menguji kembali pengisian kuesioner pembelajaran dan draf nilai mahasiswa secara berkala.

P (Pengendalian) – Pengendalian Mutu Akademik

Tindakan korektif yang diambil secara cepat apabila ditemukan ketidaksesuaian atau kendala selama masa evaluasi kurikulum.

1. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM): Membahas hasil temuan AMI/ISO terkait kurikulum guna merumuskan solusi atas kendala akademis.
2. Intervensi Beban Belajar: Jika ditemukan draf RPS mata kuliah tertentu yang kembali membengkak melebihi 5 butir CPL, Kaprodi berhak melakukan pencoretan atau penataan ulang bersama dosen pengampu demi menjaga fokus kedalaman materi.
3. Pemberian Reward/Punishment: Memberikan pelatihan penyusunan perangkat dokumen hukum (seperti draf kontrak atau peraturan internal) bagi dosen yang metode pembelajarannya dinilai belum optimal mencapai target CPL8.

P (Peningkatan) – Peningkatan Standar Kurikulum

Upaya berkelanjutan untuk memperbarui standar kurikulum agar senantiasa relevan dengan perkembangan hukum positif, teknologi, dan kebutuhan pasar.

1. Pembaruan Bahan Kajian: Memperbarui materi perkuliahan secara berkala, terutama pada konsentrasi kontemporer seperti Tindak Pidana Ekonomi Siber dan Hukum Teknologi Informatika.
2. Tracer Study & Masukan Pengguna: Mengundang asosiasi profesi (seperti Advokat, Hakim, Jaksa, Legislatif/Legal Drafter, maupun Arbiter) untuk meninjau kecocokan kompetensi lulusan Magister dengan kebutuhan praktis di lapangan.
3. Redesain Kurikulum Masa Depan: Menjadikan seluruh data siklus PPEPP periode berjalan sebagai dokumen dasar bagi tim perumus untuk melakukan rekonstruksi kurikulum mayor pada siklus 4 atau 5 tahunan berikutnya.

10 Penutup

Melalui pengembangan kurikulum Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasila yang berbasis pada Panduan KPT 4.0 dan orientasi Outcome-Based Education (OBE) ini, Program Studi menaruh harapan besar agar implementasinya mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya unggul secara teoretis akademis, tetapi juga adaptif dan responsif terhadap dinamika hukum kontemporer. Kurikulum ini diharapkan menjadi kompas strategis yang mampu menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila sekaligus membentuk yuris-yuris magister yang memiliki ketajaman penalaran hukum (legal reasoning) berstandar global serta integritas moral yang kokoh di tengah era transformasi digital.

Keberhasilan kurikulum ini sangat bergantung pada konsistensi dan sinergi dalam pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, komitmen seluruh sivitas akademika terutama para dosen pengampu mata kuliah dalam mengadopsi modalitas pembelajaran bauran (blended learning) serta metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student-centered learning) menjadi kunci utama. Implementasi perangkat pembelajaran yang komprehensif, mulai dari Rencana Pembelajaran Semester (RPS) hingga instrumen penilaian berbasis rubrik objektif, akan dikawal secara ketat demi memastikan setiap proses perkuliahan berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu ISO.

Pengembangan kurikulum ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah siklus dinamis yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan (continuous quality improvement). Melalui penerapan siklus PPEPP yang disiplin, Program Studi berkomitmen untuk terus mengevaluasi dan memutakhirkan kurikulum ini berdasarkan umpan balik tracer study, tuntutan pengguna lulusan (stakeholders), dan perkembangan hukum terbaru. Upaya peningkatan mutu secara terus-menerus ini merefleksikan dedikasi Universitas Pancasila dalam menyelenggarakan pendidikan hukum jenjang pascasarjana yang bermutu tinggi, relevan, dan berkontribusi nyata bagi pembangunan hukum nasional.